



IMPLEMENTASI WOMEN20 (W20) COMMUNIQUE DI INDONESIA PADA TAHUN 2022-2023

Yoza Aditya Pramudita¹

Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Riau, Indonesia¹
yozaadityap@gmail.com

INFO ARTIKEL

Naskah diterima: 30
September 2024
Naskah disetujui untuk
diterbitkan: 4 Oktober 2024
Diterbitkan: 15 Oktober
2024
Volume: 01
Issue: 01
DOI:-

KATA KUNCI

W20, Gender, Women,
Indonesia.

ABSTRACT

This research explained the implementation of the Women20 (W20) Communique in Indonesia from 2022 to 2023. As one of the multilateral cooperation forums, Women20 was present as a solution in determining the resolution of gender equality issues. Indonesia hosted the W20 meeting in 2022, highlighting 5 priority areas for discussion regarding gender equality issues. These five priority areas were non-discrimination and equality for women, the implementation of women-owned MSMEs, equitable health responses, rural women's development, and equality for women with disabilities. This research used qualitative methodology, with data collection techniques implemented through literature studies sourced from books, journals, articles, and websites. This research utilized the theory of global governance of gender and focused on the period between 2022 and 2023. The findings of this paper presented various government efforts to empower Indonesian women through programs such as the Women and Child-Friendly Village (DRPPA), the ASEAN Women Entrepreneurship Network (AWEN), the W20 Sispreneur program, the Women in Digital Entrepreneurship (WiDE) program, the Family Hope Program (PKH), the establishment of the Child Protection Act, the program to Enhance Women's Role Towards Healthy and Prosperous Families (P2WKSS), the Synergy and Collaboration for Accelerating Basic Services (SKALA) program, and the Nusantara Economic Heroes (PENA) program.

Pendahuluan

Pembahasan mengenai kesetaraan gender pada G20 dibawa oleh sebuah forum yang dinamakan dengan Women20 (W20). Forum W20 terbentuk pertama kali pada tahun 2015 pada saat presidensi G20 di Turki.¹ Tujuan utama dari dibentuknya forum ini adalah untuk memastikan bahwa perempuan dapat ikut serta dalam menjalankan diskusi G20 dan mengumumkan kebijakan-kebijakan mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Kehadiran W20 didorong oleh sulitnya perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam ruang lingkup publik.

Pada tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan G20 dengan menyokong tema “*Recover Together, Recover Stronger*”.² Indonesia mengangkat tema tersebut untuk mengajak seluruh dunia agar dapat saling mendukung untuk pulih bersama dari masa pandemi Covid-19, serta tumbuh menjadi lebih kuat dan menjalin kerja sama berkelanjutan. Pembawaan tema “*Recover Together, Recover Stronger*” oleh G20 di tahun 2022 tentunya memiliki pembahasan yang berbeda

¹ Women20, “About Women20”, <https://www.w20indonesia.org/#about> diakses pada 5 Desember 2023

² Bank Indonesia, “Presidensi G20 Indonesia 2022”, <https://www.bi.go.id/id/g20/default.aspx> diakses pada 5 Desember 2023



dengan pembahasan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Dalam forum W20, pembahasan isu dengan tema “*Recover Together, Recover Stronger*” mengarah kepada bagaimana perempuan dapat ikut beradaptasi dalam dunia perekonomian setelah selesainya pandemi.

Di tahun 2022, W20 memiliki 5 pembahasan utama dalam mengangkat kesetaraan gender, di antaranya pembahasan mengenai sikap non-diskriminasi dan kesetaraan terhadap perempuan, pelaksanaan kegiatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang dimiliki oleh perempuan, respon kesehatan yang adil, pengembangan perempuan pedesaan, serta kesetaraan terhadap perempuan dengan disabilitas.³ Pembahasan ini kemudian dibawa ke dalam puncak KTT G20 dan menghasilkan *communiqué* perumusan permasalahan gender. *Women20 Communiqué* menjadi sebuah masukan atau usulan bagi negara anggota G20 dalam mengatasi permasalahan gender yang diangkat di dalam forum pembahasan.

Pada masa presidensi G20 di Indonesia pada tahun 2022, *Women20 Communiqué* berisikan 3 usulan untuk para pemimpin G20 yang di antaranya, usulan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerja perempuan berdasarkan komitmen yang telah dikemukakan pada deklarasi pemimpin G20 di tahun 2021 dalam melaksanakan *Roadmap* Roma, menciptakan jaringan data gender G20 dan dasbor hasil W20 yang mencakup transparansi data dan pemantauan kinerja yang menunjukkan bidang tindakan terbaik dan meningkatkan pembuatan kebijakan berbasis bukti, dan mengembangkan atau meningkatkan *National Strategy on Gender Equity dan Equality* (NSGEE) sejalan dengan perjanjian hak asasi manusia.⁴ Pembahasan mengenai isu gender merupakan sebuah isu yang terus dibawa dari tahun ke tahun oleh W20 dan dikembangkan secara terus menerus agar solusi mengenai permasalahan gender dapat dimaksimalkan.

Penulisan ini berfokus terhadap upaya-upaya yang telah negara Indonesia lakukan dalam mencapai pemberdayaan perempuan berdasarkan dari 5 pembahasan area prioritas yang telah ditetapkan di pertemuan W20 di Indonesia. Program-program ini juga bergerak dalam mencapai rekomendasi-rekomendasi yang telah ditetapkan pada pertemuan W20 di Indonesia pada tahun 2022.

Tinjauan Pustaka

Pada penulisan ini, penulis menggunakan teori *governance of gender*. Teori *global governance of gender* dapat diartikan sebagai tata kelola global dalam *gender*. Teori ini menjadi suatu pembahasan yang kerap dibahas pasca krisis keuangan global.⁵ Teori ini mengungkapkan bahwa kesenjangan politik, ekonomi, dan sosial berdasarkan gender di seluruh perekonomian politik merupakan hambatan utama terhadap pertumbuhan dan daya saing perekonomian.⁶ Kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi dinilai sebagai pendorong utama terciptanya bentuk-bentuk pertumbuhan ekonomi yang baru dan lebih berkelanjutan. Dengan demikian, Aktor-aktor dan jaringan transnasional hadir untuk mendorong integrasi gender ke dalam pembuatan kebijakan dan tata kelola ekonomi.

Pada saat kesetaraan gender telah menjadi pembahasan utama dalam pengelolaan ekonomi, profil gender yang tidak seimbang dari para pengambil keputusan ekonomi juga semakin terlihat.

³ Women20, *Op. Cit.*

⁴ Women20, “Women20 Communiqué Edition 2022”, <https://www.w20indonesia.org/#communiqué>, diakses pada 6 Maret 2024

⁵ Anthony Payne, dan Nicola Phillips, eds. “Handbook of the international political economy of governance”, Edward Elgar Publishing, 2014. hal 340

⁶ *Ibid.*



Pemerintah dan perusahaan sadar terhadap potensi implikasi kinerja negatif dari struktur pemerintahan mereka yang sebagian besar didominasi oleh laki-laki. Kepemimpinan perempuan dalam tata kelola ekonomi dipandang sebagai sebuah pergerakan yang mengembalikan kepercayaan terhadap pasar dan mewujudkan kembali harapan bahwa kerugian sosio-ekonomi, yang disebabkan oleh gender, seksualitas, ras, kebangsaan dan status migran, dan sebagainya, dapat diperbaiki.

Para pemikir feminis sangat peduli dengan siapa yang memerintah, bagaimana mereka memerintah, dan apa dampak sosial, politik dan ekonomi bagi kelompok yang terpinggirkan dalam perekonomian global. Kaum feminis memandang kesetaraan gender dalam pemerintahan sebagai suatu hal yang diperlukan, namun bukan suatu hal yang dapat memaksimalkan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi. Tanpa akuntabilitas kepada publik yang peduli dengan hasil-hasil pembangunan manusia, ada kemungkinan bahwa para pengambil keputusan, tanpa memandang gender baik laki-laki ataupun perempuan dapat memajukan agenda-agenda ekonomi dengan akses yang setara terhadap sumber daya.

Berdasarkan pemikiran mengenai tata kelola global, peningkatan partisipasi perempuan dalam tata kelola ekonomi hanyalah salah satu dimensi feminis dalam dunia perpolitikan. Hal ini harus dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan lain terhadap tata kelola global yang mengatasi devaluasi sektor-sektor perekonomian yang terfeminisasi, mendorong hak-hak dan sumber daya untuk mendukung pekerja dan memperluas ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam perdebatan politik mengenai kebijakan, prioritas ekonomi, serta pengaturan tata kelola.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang meneliti objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci.⁷ Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lainnya secara holistik melalui cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa terhadap suatu konteks khusus yang alamiah.⁸ Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, dimana penelitian ini memfokuskan diri secara mendalam pada satu obyek tertentu dan menelaahnya sebagai sebuah kasus. Data studi kasus dapat diterima dari setiap pihak yang berkaitan, atau dapat dikatakan juga bahwa data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber.⁹

Penelitian kualitatif ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang menekankan pada penjelasan sistematis mengenai fakta-fakta yang telah dikumpulkan saat penelitian dilakukan.¹⁰ Penelitian tipe deskriptif memiliki tujuan untuk memaparkan penjelasan, deskripsi, dan validasi dari sebuah permasalahan yang diteliti. Penelitian tipe deskriptif ini memberikan gambaran mengenai implementasi *communique* Women20 dalam meningkatkan komitmen kesetaraan gender pada presidensi Group of 20 Indonesia.

⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 51.

⁸ Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 4.

⁹ Nawawi Hadari, "Metode Penelitian Bidang Sosial", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hal. 31.

¹⁰ Anwar Sanusi, "Metodologi Penelitian Bisnis", (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal. 13



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penelitian studi kepustakaan dapat didefinisikan dengan penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data dan informasi melalui karya tulis ilmiah atau kajian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berpedoman pada penelitian yang mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Menurut J. Supranto, Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan materi data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.¹¹

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah tahapan penting dalam menulis sebuah penelitian. Sebelum peneliti membahas mengenai permasalahan yang diangkat, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu mengenai sumber informasi ilmiah yang telah didapatkan. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan artikel berita, jurnal ilmiah, internet, dan sumber-sumber valid serta relevan lainnya untuk mengkaji penelitian.

Analisis

Permasalahan gender di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang masih sering terjadi karena masih adanya praktik patriarki di Indonesia selaku warisan budaya dari masa kolonialisme.¹² Praktik patriarki ini sering kali menghambat perempuan dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, ketenagakerjaan dan kemajuan teknologi. Tidak hanya itu, patriarki juga sering kali menimbulkan tindak kekerasan terhadap perempuan karena adanya rasa superioritas yang dimiliki oleh laki-laki di dalam status sosialnya. Praktik patriarki ini membuat banyak perempuan merasa terpuruk dan sulit untuk menjalani kehidupannya karena harus lebih banyak mengalah kepada laki-laki.

Dalam mengatasi permasalahan kesetaraan gender yang tengah terjadi di negara Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan pada ruang lingkup publik. Salah satu upaya yang dibentuk oleh negara Indonesia adalah dengan membentuk panitia penyelenggara forum kegiatan W20 yang dipimpin oleh Hardiani Uli Silalahi yang merupakan ketua Kowani dan Dian Siswarini yang merupakan CEO XL Axiata. Pembentukan panitia ini memudahkan jalannya forum pembahasan W20 dan menyokong beberapa ide kegiatan selama berlangsungnya pertemuan W20. Kowani beserta XL Axiata juga telah mengeluarkan beberapa kegiatan yang dapat membantu banyak perempuan Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender.

Dalam mempersiapkan pertemuan W20, panitia W20 Indonesia telah membentuk 4 webinar yang mengangkat tema seputar area prioritas, yaitu usaha inklusi ekonomi di Indonesia, diskriminasi & kesetaraan perempuan, pemberdayaan perempuan pedesaan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas, serta peningkatan kesehatan untuk kesejahteraan perempuan. Webinar yang telah diadakan oleh W20 ini diarsipkan pada laman *Youtube* Kowani dan berlangsung pada tanggal yang berbeda-beda. Webinar pertama mengenai inklusi ekonomi di Indonesia berlangsung pada tanggal 9 September 2021, webinar kedua mengenai diskriminasi & kesetaraan perempuan berlangsung pada tanggal 21 Oktober 2021, webinar ketiga mengenai pemberdayaan perempuan pedesaan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas berlangsung pada tanggal 24 November 2021, dan webinar keempat mengenai peningkatan kesehatan untuk kesejahteraan perempuan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2021. Terdapat beberapa program lainnya yang telah negara Indonesia bentuk dalam mengatasi permasalahan

¹¹ J. Supranto, "Metode Penelitian Hukum dan Statistik". (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 31

¹² Women20, *Op. Cit.*



gender di Indonesia. Program-program tersebut dikategorikan berdasarkan pada area prioritas W20 di Indonesia pada tahun 2022.

a. Pemberdayaan Perempuan Terkait Sikap Diskriminasi

Dalam mengatasi permasalahan sikap diskriminasi yang dialami oleh perempuan, negara Indonesia telah membentuk program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Program DRPPA ini merupakan program kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri.¹³ Program DRPPA dinilai sebagai desa yang berwawasan gender dan hak anak dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Saat ini tercatat DRPPA/KRPPA sudah ada di 33 provinsi, 68 kabupaten/kota, dan 138 desa/kelurahan.¹⁴

DRPPA/KRPPA adalah salah satu upaya untuk bisa mewujudkan 5 Arah Presiden, yakni (1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, (2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, (3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, (4) penurunan pekerja anak, dan (5) pencegahan perkawinan anak.¹⁵ Program DRPPA ini terdiri dari 10 indikator, yaitu organisasi perempuan dan anak di desa, data desa terkait dengan segregasi data perempuan dan anak, Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa tentang DRPPA, sumber daya keuangan desa dan aset desa untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, representasi perempuan dalam pemerintahan desa, usaha milik perempuan di desa, hak-hak anak, kekerasan terhadap perempuan, anak-anak dan korban perdagangan manusia, buruh anak, dan pernikahan dini bagi anak-anak.¹⁶

Implementasi DRPPA/KRPPA menurut Menteri PPPA sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat yang merupakan modal sosial, sehingga Kemen PPPA telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong gerakan masyarakat di desa/kelurahan, melalui Gerakan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). Selama 2 tahun berjalan, DRPPA/KRPPA sudah memunculkan hasil yang bermanfaat, seperti perempuan yang sudah berani berpendapat, berani berkompetisi dalam pemilihan kepala desa, munculnya pemahaman terhadap bentuk-bentuk kekerasan pada anak-anak, dan munculnya usaha kecil milik perempuan.¹⁷ Salah satu program DRPPA yang sedang berlangsung dapat dilihat dari kabupaten Kediri dan telah berhasil menjalankan program tersebut secara maksimal.

¹³ Alvina Zahra Wicaksana dan Farida Rahmawati, "The Impact of Women's Empowerment and its Contribution on Indonesia's Economic Growth", *Saudi Journal of Economics and Finance* 7, no. 4 (2023), hal. 273

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "KemenPPPA Optimis 2024, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lebih Maju", <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxOQ==>, diakses pada 25 Juni 2024.

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Buka Bimtek bagi Relawan SAPA, Menteri PPPA Bangga Para Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Berhasil Mendukung Terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)", <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDg5OA==>, diakses pada 25 Juni 2024

¹⁶ Alvina Zahra Wicaksana dan Farida Rahmawati, *Op. Cit.*

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Op. Cit.*



b. Pemberdayaan Perempuan Terkait UMKM Perempuan

Dalam mengatasi permasalahan kesetaraan gender pada area prioritas UMKM perempuan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 3 program yaitu, ASEAN Woman Entrepreneurship Network (AWEN), W20 Sispreneur dan Women in Digital Entrepreneurship (WiDE). Ketiga program ini memiliki fokus utama untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam menjalankan kegiatan perekonomian perempuan. Program-program ini juga menjadi sebuah dorongan untuk perempuan Indonesia dalam terus berkarya dan menyalurkan kreativitasnya dalam sebuah bentuk usaha.

Program pertama, ASEAN Woman Entrepreneurship Network (AWEN) secara resmi pertama kali didirikan di Thailand sebagai sebuah organisasi ekonomi untuk negara-negara ASEAN pada tanggal 22 April 2022.¹⁸ Tujuan utama dari AWEN adalah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dengan mempererat hubungan antara pemilik bisnis perempuan di seluruh negara kawasan ASEAN. Tujuan lain dibentuknya AWEN adalah untuk membangun sebuah forum regional bagi para pengusaha perempuan ASEAN untuk saling berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman mengenai kebijakan, lingkungan bisnis, investasi, serta isu sosial-politik dan dampaknya terhadap peluang usaha; membantu para pengusaha perempuan ASEAN untuk meningkatkan pengelolaan dan keterampilan bisnis; membantu pengusaha perempuan ASEAN dalam mendapatkan akses yang lebih baik terhadap lembaga keuangan, sains dan teknologi, pelatihan bisnis, serta pasar dan peluang bisnis; membantu perempuan dalam membuka usaha; serta menghubungkan perempuan dengan organisasi pengusaha perempuan internasional dan regional lainnya.¹⁹

AWEN Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan dalam mendorong kegiatan UMKM perempuan Indonesia, diantaranya berupa menyediakan pelatihan UMKM, pengusaha perempuan dan pekerja perempuan; menerapkan kegiatan promosi yang berkelanjutan untuk UMKM perempuan; memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim dan mengatasi permasalahan lingkungan; memperluas akses pasar dalam mempersiapkan digitalisasi; mempercepat inklusi keuangan, literasi keuangan dan disiplin keuangan; penyebaran informasi terhadap perempuan ASEAN dalam memperkuat hubungan antar peserta AWEN; serta memperkuat pemberdayaan kepemimpinan perempuan ASEAN dalam skala global.²⁰ AWEN yang merupakan jaringan kerja sama antara pemilik UMKM perempuan ASEAN menjadi sebuah sarana dalam memperkuat hubungan kerja sama yang sudah terjalin.

Program kedua, W20 Sispreneur merupakan program kolaborasi antara Kemen PPPA dengan PT XL Axiata Tbk.²¹ Sispreneur merupakan program yang dilaksanakan dalam bentuk kelas manajemen bisnis melalui pemanfaatan digital. Program W20 Sispreneur ini memiliki tujuan memberdayakan pengusaha perempuan dalam meningkatkan kualitas bisnis, membangun UMKM perempuan yang unggul dan memberikan akses kepada pengusaha perempuan untuk mencapai tingkat internasional melalui pemberian akses modal dan transformasi digital. Program W20 Sispreneur ini telah berhasil menjaring 1.000 peserta yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali & Nusa Tenggara, Banten, Kalimantan, hingga Sulawesi.

¹⁸ Djoko Siswanto Muhartono, Suprpti Widiasih, dan Moh Musleh, "Women Public Leadership in the Implementation of Women-Friendly Village Program Policy and Child Protection in Kediri Regency" *Social Science and Humanities Journal (SSHJ)* 8, no. 02 (2024) hal. 34447

¹⁹ ASEAN, "Terms of Reference of the ASEAN Women Entrepreneurs Network", (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2012) hal. 2

²⁰ Djoko Siswanto Muhartono, *Op. Cit.*

²¹ *Ibid.*



Keuntungan yang didapatkan oleh para peserta W20 Sispreneur adalah hadiah apresiasi bagi 10 UMKM terbaik berupa modal usaha dengan total Rp 300 juta dan para peserta lainnya mendapatkan pendampingan UMKM secara online melalui chat group maupun FGD, showcase untuk produk UMKM, mentoring bersama fasilitator penugasan online, serta dilengkapi juga dengan pre-test dan post-test pendampingan bisnis oleh pakar UMKM tingkat global. Materi mengenai pengembangan UMKM dibagi ke dalam empat sesi. Sesi pertama berisi inovasi produk dan segmentasi pasar seperti bagaimana cara menjangkau pasar dengan inovasi baru. Sesi kedua berisi perencanaan keuangan, antara lain mempelajari perencanaan keuangan. Sesi ketiga berisi business roadmap, antara lain cara membuat roadmap bisnis dengan tepat. Sesi keempat berisi digital marketing dan branding, antar lain bagaimana mengenal strategi content marketing.

Program ketiga, Women in Digital Entrepreneurship (WiDE) merupakan sebuah hasil kerja sama antara Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BRSDMK Kemen Kominfo) dan IEEE Indonesia Section dalam rangka memperingati Hari Kartini.²² Program WiDE ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa 60%% pelaku UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan dan angka ini terus meningkat di tahun 2021. Meskipun demikian, para pelaku UMKM perempuan masih belum terbiasa dengan hadirnya teknologi digital dan sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses dana untuk pengembangan usaha.

Pelatihan WiDE ditujukan untuk perempuan berusia 15-35 tahun dengan tujuan untuk menciptakan pengusaha perempuan yang familiar dengan teknologi digital dan mampu mencetak entrepreneur digital lainnya.²³ Program WiDE selama pandemi dilaksanakan dengan semangat membawa perubahan dan membantu pemulihan ekonomi keluarga. Kegiatan WiDE dilaksanakan melalui diskusi panel dan workshop. Diskusi panel ini bertujuan untuk memberikan kesadaran tentang kebijakan pemerintah dalam mendorong dan meningkatkan peran perempuan pengusaha, sedangkan workshop diadakan untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam berwirausaha digital.

c. Pemberdayaan Perempuan Terkait Respon Kesehatan Perempuan

Dalam melakukan pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan, pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.²⁴ Program Keluarga Harapan ini telah berlangsung sejak tahun 2007 sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan. PKH ini membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia. PKH juga mulai mendorong bantuan terhadap orang-orang penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Program Keluarga Harapan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018.²⁵ Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018, PKH ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memiliki anggota keluarga berupa ibu hamil dan menyusui, anak usia sekolah antara 5 hingga 21 tahun, lansia, serta penyandang disabilitas. Penerima

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Program Keluarga Harapan", <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>, diakses pada 25 Juni 2024.

²⁵ *Ibid.*



PKH ini juga memiliki beberapa persyaratan seperti masyarakat yang memiliki status warga negara Indonesia, memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Terdaftar dalam Data Terpadu (DTKS), serta berada dalam kondisi sosial ekonomi miskin dan rentan. Besar bantuan PKH ini memiliki nilai yang berbeda-beda, tergantung pada komposisi dan kondisi keluarga penerima bantuan.

Selain dari program PHK, pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak (UU KIA) yang membantu perempuan dalam mencapai kesejahteraan. UU KIA ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak di seluruh negeri.²⁶ UU KIA hadir untuk meminimalisir angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi dengan memperkuat sistem kesehatan nasional dan memastikan akses yang lebih adil dan merata pada layanan kesehatan yang berkualitas. UU KIA mencakup berbagai aspek penting seperti akses pelayanan kesehatan yang lebih baik, peningkatan kualitas gizi, pendidikan kesehatan bagi ibu dan keluarga, serta perlindungan hak-hak kesehatan ibu dan anak.

UU KIA juga memiliki beberapa poin penting yang harus dipahami oleh masyarakat umum, seperti rumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan atau melahirkan merupakan ibu pekerja yang tidak dapat diberhentikan, ibu pekerja yang berhak untuk mendapatkan upah secara penuh untuk tiga bulan pertama dan bulan keempat, serta dalam UU juga diatur mengenai hak cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan.²⁷ UU KIA juga memberikan kesempatan kepada suami untuk menemani istrinya yang sedang dalam masa persalinan dengan hak cuti. UU KIA menerapkan suami wajib mendampingi istri selama masa persalinan dengan pemberian hak cuti selama dua hari atau sesuai dengan kesepakatan pemberi kerja. Tidak hanya itu, UU KIA juga mengatur suami yang istrinya mengalami keguguran berhak untuk dapat cuti selama dua hari.

d. Pemberdayaan Perempuan Terkait Perempuan Pedesaan

Dalam melakukan pemberdayaan perempuan pedesaan, pemerintah Indonesia telah melakukan suatu program yaitu program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Program ini bergerak dibawah pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta memiliki tujuan untuk memberantas kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.²⁸ Dasar hukum mengenai program P2WKSS ini disusun melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 yang meningkatkan peran perempuan melalui pendekatan lintas sektor dan bidang pembangunan secara terkoordinasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam mencapai tingkat kehidupan berkualitas.

Salah satu penerapan program P2WKSS ini dapat dilihat pada kampung Legok di Serang yang menuntun ibu-ibu rumah tangga melalui sosialisasi dan pelatihan. Di kampung Legok ini, Program pemberdayaan perempuan P2WKSS memiliki beberapa tahapan, yang di antaranya berupa tahapan persiapan, tahapan pengkajian, tahapan perencanaan, tahapan formulasi rencana aksi, tahapan

²⁶ PKMK FKKMK UGM, "UU KIA 2024: Transformasi Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia", <https://kesehatan-ibuanak.net/web/2024/06/11/uu-kia-2024-transformasi-kebijakan-kesehatan-ibu-dan-anak-di-indonesia/>, diakses pada 25 Juni 2024.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hadiati Putri, Dadan Darmawan dan Herlina Siregar, "Pemberdayaan Perempuan Pada Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) di Kampung Legok Kelurahan Pancalaksana Kecamatan Curug Kota Serang-Banten", *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 11(2), (2023), hal. 223



pelaksanaan, tahapan evaluasi, dan tahapan terminasi. Tahapan-tahapan ini menjadi salah satu proses dalam mencapai peningkatan pemberdayaan perempuan dalam ruang lingkup kesejahteraan keluarga.

Dari tahapan-tahapan pelaksanaan program P2WKSS ini, telah didapatkan 3 hasil yang meningkatkan kesejahteraan keluarga Kampung Legok, yaitu jumlah dan pemerataan pendapat, pendidikan yang semakin mudah di jangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.²⁹ Hasil dari program P2WKSS ini membantu ibu-ibu rumah tangga di Kampung Legok untuk menambah pemasukan perekonomian keluarga melalui kreativitas yang telah dibentuk selama program P2WKSS diberlangsungkan. Tidak hanya itu, program P2WKSS ini juga membantu perempuan di Kampung Legok untuk melanjutkan pendidikan yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan melalui penyaluran bekal dan biaya pendidikan. Selain itu, program P2WKSS ini juga membantu ibu-ibu rumah tangga di Kampung Legok untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan keluarga. Program P2WKSS ini mendorong kesadaran perempuan, terutama perempuan pedesaan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

e. Pemberdayaan Perempuan Terkait Perempuan Penyandang Disabilitas

Dalam menangani permasalahan perempuan penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia telah membentuk program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) yang merupakan program kemitraan Australia-Indonesia untuk mengatasi permasalahan *Gender Equality, Disability and Social Inclusion Strategy* (GEDSI). Program SKALA memiliki tujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dengan penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.³⁰ Tidak hanya itu, SKALA juga bertujuan untuk membentuk partisipasi, keterwakilan, dan pengaruh yang lebih besar terhadap perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Program SKALA dinilai penting oleh pemerintah untuk terus mendukung pemberdayaan kelompok-kelompok yang sering mengalami ketertinggalan.

Program SKALA menganggap bahwa perempuan mengalami kesulitan dalam berpartisipasi pada ruang lingkup publik dikarenakan banyak laki-laki yang mendominasi peran tersebut.³¹ Program SKALA juga menyampaikan bahwa penyandang disabilitas mengalami beban yang lebih berat dikarenakan hal ini dianggap aib bagi sebagian keluarga sehingga mereka terbatas dalam mengakses berbagai macam hal. Program SKALA telah merincikan beberapa permasalahan yang telah terjadi bagi perempuan terutama perempuan penyandang disabilitas, yaitu permasalahan dalam bidang pendidikan, kesehatan, akses terhadap *legal identity*, ketenagakerjaan, kekerasan, serta partisipasi dalam pemerintahan. Permasalahan-permasalahan inilah yang menghambat perempuan penyandang disabilitas dalam mencapai kesejahteraan.

Dalam menangani permasalahan perempuan disabilitas, SKALA membentuk GEDSI yang terdiri dari beberapa prinsip, yaitu tiada tentang kita tanpa kita, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan diskriminasi, menjunjung nilai keberagaman, bergerak bersama sistem pemerintahan, dan penilaian regional.³² Dalam menjalankan program dan prinsip GEDSI, SKALA menerapkan strategi intervensi yang menyeluruh dan terintegrasi yang mencakup pilar-pilar program, fungsi organisasi, proses internal, dan intervensi khusus dalam menangani permasalahan spesifik yang dialami oleh

²⁹ *Ibid.*

³⁰ SKALA, "Gender Equality, Disability and Social Inclusion Strategy 2023-2026", (Jakarta: 2023)

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*



kelompok rentan tertentu. GEDSI menjalankan pendekatan *multi-track* yang memastikan orang-orang penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam menjalankan program GEDSI, SKALA menerapkan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan inklusifitas perempuan penyandang disabilitas, di antaranya yaitu rekrutmen kerja yang berfokus terhadap penyandang disabilitas, pembentukan program magang, serta penyediaan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas.³³ Program-program ini tentunya membantu perempuan penyandang disabilitas dalam mencapai kesetaraan yang lebih baik terhadap ruang lingkup sosial. Dalam menjalankan program ini, SKALA melakukan kerja sama dengan beberapa rekan atau organisasi, yaitu di antaranya adalah *Australia Indonesia Health Security Partnership* (AIHSP), *INKLUSI Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society*, *PROSPERA Australia Indonesia Partnership for Economic Development*, *Kemintan Indonesia Australia untuk Infrastruktur* (KIAT), *Australia Awards Indonesia* (AAI), *Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat* (ERAT), *The World Bank*, *UN WOMEN*, *United Nations Population Fund* (UNFPA), dan *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan* (TNP2K).

Selain dari penerapan program SKALA GEDSI, pemerintah Indonesia juga telah membentuk Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dalam membantu pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas. Program PENA merupakan sebuah kegiatan pelatihan program pengembangan ekonomi yang mencakup beberapa jenis usaha berbeda seperti kerajinan, jasa, pangan, pertanian atau pembibitan yang sarasannya adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).³⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia mengatakan bahwa 70% penerima program PENA merupakan perempuan termasuk perempuan penyandang disabilitas.³⁵ Program PENA dapat memberikan pengembangan keterampilan dan membuka informasi pasar kepada perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses ruang privat dan publik.

Program PENA ini mendorong masyarakat untuk dapat membuka usaha milik pribadi, sehingga mereka tidak perlu merasa ketergantungan terhadap bantuan dari dinas sosial. Program PENA menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mendorong perempuan penyandang disabilitas untuk dapat memiliki jiwa yang produktif. Program PENA dan SKALA GEDSI menjadi sebuah sarana bagi perempuan terutama perempuan penyandang disabilitas untuk merasakan inklusifitas dalam kehidupan bersosial dan berekonomi. Bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia ini dapat dijalankan dengan efektif apabila pelaksanaan program-program tersebut dapat dilanjutkan dari tahun ke tahun.

Simpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi perempuan Indonesia telah berangsur membaik dari tahun ke tahun. Sudah terdapat banyak program yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalisir kondisi kesenjangan gender di Indonesia. Upaya pemerintah

³³ *Ibid.*

³⁴ Pemerintah Kabupaten Pemalang Kecamatan Belik, "Pahlawan Ekonomi Nusantara", [https://belik.pemalangkab.go.id/2024/03/pahlawanekonominusantara/#:~:text=PENA%20\(Pahlawan%20Ekonomi%20Nusantara\)%20adalah,Keluarga%20Penerima%20Manfaat%20\(KPM\)](https://belik.pemalangkab.go.id/2024/03/pahlawanekonominusantara/#:~:text=PENA%20(Pahlawan%20Ekonomi%20Nusantara)%20adalah,Keluarga%20Penerima%20Manfaat%20(KPM),), diakses pada 27 Juni 2024.

³⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Di Hadapan Menteri ASEAN, Mensos Paparkan Kemajuan Program Pemberdayaan Sosial untuk Perempuan dan Penyandang Disabilitas", <https://kemensos.go.id/di-hadapan-menteri-asean-mensos-paparkan-kemajuan-program-pemberdayaan-sosial-untuk-perempuan-dan-penyandang-disabilitas>, diakses pada 27 Juni 2024.



Indonesia ini selaras dengan teori *global governance of gender* yang membantu perempuan Indonesia untuk turut serta dalam menjalankan tata kelola global. Sudah banyak perempuan Indonesia yang dapat merasakan pemberdayaan ekonomi seperti inklusifitas dalam memegang kekuasaan serta kesempatan lainnya yang sebelumnya hanya didapatkan oleh pihak laki-laki.

Penerapan Women20 Communique tahun 2022 di Indonesia juga telah berlangsung dengan mudah dikarenakan telah terdapat beberapa program yang telah dikembangkan oleh pemerintahan negara Indonesia dalam menyokong kegiatan pemberdayaan perempuan. Penerapan program pemberdayaan perempuan yang telah dibentuk oleh pemerintah negara Indonesia ini diharapkan untuk tetap terus berlanjut. Keberlanjutan program-program yang telah dibentuk tersebut mendorong negara Indonesia menjadi negara yang aman dan damai. Peningkatan kualitas perempuan negara Indonesia juga dapat mendorong negara Indonesia menjadi negara yang maju. Dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan tersebut, perempuan memegang peranan yang sangat penting. Dengan semakin meningkatnya kemauan perempuan Indonesia untuk terus berkembang, maka kesuksesan program pemerintah dapat membuahkan hasil yang optimal.

Referensi

- ASEAN. Terms of Reference of the ASEAN Women Entrepreneurs Network. (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2012)
- Bank Indonesia. "Presidensi G20 Indonesia 2022". <https://www.bi.go.id/id/g20/default.aspx> diakses pada 5 Desember 2023.
- Hadari, Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Buka Bimtek bagi Relawan SAPA, Menteri PPPA Bangga Para Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Berhasil Mendukung Terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)". <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDg5OA==>, diakses pada 25 Juni 2024
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "KemenPPPA Optimis 2024, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lebih Maju". <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxOQ==>, diakses pada 25 Juni 2024.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Di Hadapan Menteri ASEAN, Mensos Paparkan Kemajuan Program Pemberdayaan Sosial untuk Perempuan dan Penyandang Disabilitas". <https://kemensos.go.id/di-hadapan-menteri-asean-mensos-paparkan-kemajuan-program-pemberdayaan-sosial-untuk-perempuan-dan-penyandang-disabilitas>, diakses pada 27 Juni 2024.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Program Keluarga Harapan". <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>, diakses pada 25 Juni 2024.
- Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: LP3ES, 1994.
- Moleong, Lexy J. Metode penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhartono, Djoko Siswanto, Suprpti Widiastih, dan Moh Musleh. "Women Public Leadership in the Implementation of Women-Friendly Village Program Policy and Child Protection in Kediri Regency". *Social Science and Humanities Journal (SSHJ)* 8, no. 02 (2024): 34442-34452
- Payne, Anthony, dan Nicola Phillips, eds. "Handbook of the international political economy of governance". Edward Elgar Publishing, 2014.
- Pemerintah Kabupaten Pematang Kecamatan Belik. "Pahlawan Ekonomi Nusantara". <https://belik.pematangkab.go.id/2024/03/pahlawan->



- ekonomi nusantara/#:~:text=PENA%20(Pahlawan%20Ekonomi%20Nusantara)%20adalah,Keluarga%20Penerima%20Manfaat%20(KPM), diakses pada 27 Juni 2024.
- PKMK FKKMK UGM. "UU KIA 2024: Transformasi Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia". <https://kesehatan-ibuanak.net/web/2024/06/11/uu-kia-2024-transformasi-kebijakan-kesehatan-ibu-dan-anak-di-indonesia/>, diakses pada 25 Juni 2024.
- Putri, Hadiati, Dadan Darmawan dan Herlina Siregar. "Pemberdayaan Perempuan Pada Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) di Kampung Legok Kelurahan Pancalaksana Kecamatan Curug Kota Serang-Banten". *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 11(2) (2023): 222-228
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016
- SKALA. *Gender Equality, Disability and Social Inclusion Strategy 2023-2026*. (Jakarta: 2023)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Wicaksana, Alvina Zahra dan Farida Rahmawati. "The Impact of Women's Empowerment and its Contribution on Indonesia's Economic Growth". *Saudi Journal of Economics and Finance* 7, no.4 (2023): 267-278
- Women20. "About Women20". <https://www.w20indonesia.org/#about> diakses pada 5 Desember 2023
- Women20. "Policy Dialogue "Freedom from Discrimination: Historical Journey from Japan to Indonesia" Terms of Reference". https://g20-indonesia.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Terms_of_Reference_Likupang_EN_804fcc75b.pdf, diakses pada 6 Maret 2024
- Women20. "Women20 Communique Edition 2022". <https://www.w20indonesia.org/#communique>, diakses pada 6 Maret 2024